



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI NURUL IHSAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 263466

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/250 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 450.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, KLX MOTOR TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOTOR, PIAGIO SPRINT 150 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 477.153.767

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.662.153.767



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.662.153.767

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.